

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 184 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PASAL 12 AYAT (2) HURUF E PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGERA BARAT NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN BENIH
BERSERTIFIKAT SERTA PENGGUNAAN TEMPAT PEMERIKSAAN BENIH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Benih Bersertifikat Serta Penggunaan Tempat Pemeriksaan Benih, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Pasal 12 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Benih Bersertifikat Serta Penggunaan Tempat Pemeriksaan Benih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727)

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-254/MK.7/2009 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Pasal 12 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Benih Bersertifikat Serta Penggunaan Tempat Pemeriksaan Benih, dengan alasan bahwa sertifikasi benih/bibit tanaman merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- KEDUA : Agar Bupati Maluku Tenggara Barat menghentikan pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Benih Bersertifikat Serta Penggunaan Tempat Pemeriksaan Benih paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

DIAH ANGGRAENI
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19540406 198003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 7. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
 8. Gubernur Maluku;
- Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat